



Agus Subianto <agus.subianto@dsngroup.co.id>

Request to Land Clearing & Palm Oil Planting from Dahas Bolau Family on Tapin Bini Village

'Amir Hamzah Ritonga' via BC MS Agro <ms.agro@dsngroup.co.id>

Fri, Jun 12, 2026 at 8:53 PM

Reply-To: Amir Hamzah Ritonga <amir.ritonga@rspo.org>

To: Watik Tri <watik.tk@dsngroup.co.id>

Cc: RSPO Risk Unit <risk@rspo.org>, Aryo Gustomo <aryo.gustomo@rspo.org>, Mohd Zaidee Mohd Tahir <zaidee.tahir@rspo.org>, Citra Hartati <citra.hartati@rspo.org>, Sarsongko Wachyutomo <sarsongko@rspo.org>, Muhamad Iqbal bin Jailan <iqbal.jailan@rspo.org>, Farkhani Noor Bt Basir <farkhani@rspo.org>, Agit Supriadi <agit.supriadi@rspo.org>, Agus Setiabudi <agus.setiabudi@dsngroup.co.id>, Danar Surya Wiranagara <danar.wiranagara@dsngroup.co.id>, Denys Collin Munang <denys.munang@dsngroup.co.id>, ms agro <ms.agro@dsngroup.co.id>, Teguh Triono <teguh.triono@dsngroup.co.id>, Yulia Rossana <yulia.rossana@rspo.org>

Dear Ibu Watik,

Dengan hormat,

Pertama-tama, kami mengucapkan terima kasih atas informasi dan dokumen yang Ibu sampaikan sebagai bahan pembahasan mendalam di tingkat Sekretariat RSPO mengenai aspirasi masyarakat Kelurahan Tapin Bini terkait usulan penambahan areal plasma pada kawasan yang telah teridentifikasi sebagai *High Conservation Value* (HCV) dan *High Carbon Stock* (HCS).

Berdasarkan hasil peninjauan internal (*internal review*) oleh tim Sekretariat RSPO, dengan senantiasa mempertimbangkan prinsip kehati-hatian serta keberlanjutan pemenuhan persyaratan *RSPO Principles and Criteria* (P&C) oleh perusahaan Ibu, bersama ini kami sampaikan beberapa poin penting sebagai berikut:

Sekretariat RSPO memandang krusial bagi perusahaan untuk tetap menjaga kawasan yang telah teridentifikasi sebagai HCV dan/atau HCS, serta mengelolanya sesuai dengan tujuan konservasi yang mengacu pada standar RSPO yang berlaku. Oleh karena itu, konversi atau pembukaan lahan di area HCV-HCS tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi logis, antara lain:

1. **Ketidaksesuaian (*Non-Conformance/NC*):** Perusahaan dinilai melakukan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan persyaratan RSPO P&C Kriteria 7.2. Hal ini dapat mengakibatkan penangguhan (*suspension*) atau pencabutan (*termination*) sertifikat RSPO yang saat ini dimiliki.
2. **Implikasi pada Proses RaCP:** Mengingat unit manajemen telah tersertifikasi RSPO, status *Remediation and Compensation Procedure* (RaCP) dapat ditangguhkan karena adanya potensi penambahan *Final Conservation Liability* (FCL), sehingga diperlukan proses peninjauan kembali (*review*).
3. **Status Sertifikasi Area:** Area HCV-HCS yang dibuka tidak akan dapat disertifikasi karena dinilai telah melanggar persyaratan standar RSPO P&C.
4. **Dampak pada Rantai Pasok (*Supply Chain*):** Apabila terdapat Tandan Buah Segar (TBS) dari area yang tidak memenuhi persyaratan RSPO masuk ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang tersertifikasi dengan model *Identity Preserved* (IP), hal tersebut berpotensi mengubah model sertifikasi menjadi *Mass Balance* (MB). Kesesuaian pengelolaan rantai pasok ini nantinya akan menjadi bagian dari proses verifikasi oleh Badan Sertifikasi (*Certification Body/CB*) sesuai dengan ketentuan RSPO P&C yang berlaku.

Kami sangat memahami kebutuhan serta harapan masyarakat untuk memperoleh manfaat ekonomi melalui pengembangan kebun plasma. Kami juga menyadari bahwa area yang diusulkan tersebut masih berada di dalam wilayah Hak Guna Usaha (HGU) yang menjadi tanggung jawab pengelolaan perusahaan. Namun

demikian, usulan tersebut perlu dipertimbangkan secara cermat dengan tetap memprioritaskan aspek lingkungan, sosial, legalitas, kepatuhan terhadap standar RSPO, serta komitmen keberlanjutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat RSPO menyarankan agar PT PWP dapat menganalisis kembali program pengembangan plasma pada area alternatif yang:

- Tidak teridentifikasi sebagai kawasan HCV maupun HCS, dan jika memungkinkan, diarahkan pada area di luar konsesi PT PWP.
- Memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, persyaratan sosial dan lingkungan yang relevan, serta selaras dengan hasil kajian teknis dan rekomendasi yang ada.
- Ditetapkan melalui proses pengambilan keputusan yang mengedepankan prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC).

Demikian pertimbangan ini kami sampaikan. Sekretariat RSPO berharap seluruh pihak dapat terus mengedepankan prinsip keberlanjutan, memastikan kepatuhan terhadap standar yang berlaku, serta bersama-sama mencari solusi konstruktif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.

Atas perhatian, kerja sama, dan klarifikasi yang Ibu berikan, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Amir Hamzah Ritonga

Manager, Environmental Management (Indonesia)
Integrity Unit, Assurance Department

Roundtable on Sustainable Palm Oil

+62 21 27899890 | [Get in touch](#) | www.rspo.org

[Quoted text hidden]

